

14/92

Hukum

LAPORAN PENELITIAN

Dana SPP/DPP.

MASALAH YANG DIHADAPI INSPEKTORAT  
WILAYAH KOTAMADYA DALAM MELAKUKAN  
PENGAWASAN DI KOTAMADYA PADANG  
PANJANG.

OLEH : SRI ARNETTI, SH ( Ketua ).

GUSMINARTI, SH ( Anggota ).

FRENADIN ADEGUSTARA, SH ( Anggota ).



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PUSAT PENELITIAN UNIVERSITAS ANDALAS  
GEDUNG REKTORAT LANTAI 11 KAMPUS UNIVERSITAS ANDALAS LIMAU MANIS PADANG  
TELP. 28981 PES. 327-328.

## B A B I.

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG.

Sebagaimana kita ketahui bahwa sekarang ini didalam negara kita sedang sibuk-sibuknya membicarakan tentang - pengawasan mulai dari Tingkat Pusat sampai kedaerah dengan segala bentuk dan namanya, yang kalau kita perhatikan kesemuanya itu tidak lain tidak bukan adalah untuk menjamin kelancaran terhadap jalannya pemerintahan dan menghindari agar jangan terjadi bermacam-macam ketimpangan - dan aneka ragam penyelewengan dalam Negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Sebab segala sesuatu pekerjaan atau suatu kegiatan tanpa ada pengawasan tentu akan - bisa berjalan menurut sesuka hati yang mengerjakan saja, ini disebabkan yang mengerjakan itu adalah manusia yang tidak luput dari segala kelemahan.

Dan juga kalau diperhatikan dilakukannya pengawasan tersebut juga sebagai realisasi dari peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang telah berlaku di negara - apakah berbentuk :

- Undang-Undang.
- Keputusan-keputusan/Peraturan-peraturan.
- Dan lain-lainnya.

Berdasarkan uraian diatas inilah timbul keinginan - dari peneliti untuk meneliti mengenai pengawasan ini, walaupun skop yang diambil bukanlah secara keseluruhan akan tetapi adalah mengenai Pengawasan di Daerah yang -

lokasi penelitiannya dilakukan di Kotamadya Padang Panjang dengan Topik " Masalah yang dihadapi Inspektorat Wilayah Kotamadya dalam melakukan Pengawasan di Kotamadya Padang Panjang.

Disini peneliti lebih menstreskan kepada masalah yang dihadapi Inspektorat Wilayah Kotamadya Padang Panjang dalam melaksanakan tugasnya sebagai lembaga pengawas dan pemeriksa khususnya di Kotamadya Padang Panjang, sebab banyak sedikitnya hambatan atau masalah yang ditemui dalam melaksanakan tugasnya akan menentukan pula hasil yang diperoleh dan akan menentukan sekali terhadap laporan yang akan dibuat.

Juga hambatan disini dilihat dari cukup tidak aparat dalam lembaga ini juga mengenai Dana yang tersedia dan hubungan dengan Instansi yang terlibat dengan pengawasan tersebut.

Sebagai dasar hukum dari pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah Kotamadya ini adalah :

- Undang-undang No.5 / Tahun 1974 tentang :  
Pokok-Pokok Pemerintahan didaerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 Tahun 1975 tentang :  
Cara Pengawasan Umum Atas jalannya Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan tugas Departemen Dalam Negeri.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No.220 Tahun 1979 tentang :  
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi, Tata Kerja Inspektorat Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II.

## B A B IV

### HASIL PENEMUAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini peneliti akan membahas dan menemukan hasil penelitian selama melakukan penelitian dengan judul - "Masalah yang dihadapi Inspektorat Wilayah Kotamadya Dalam melakukan pengawasan di Kotamadya Padang Panjang, sebagaimana uraian berikutnya ini :

#### A. LOKASI PENELITIAN.

Sebagaimana judul penelitian ini maka lokasi penelitian yang peneliti lakukan adalah di Kantor Inspektorat Wilayah Kotamadya Padang Panjang yang terletak di - Jalan St. Syahrir No.90 Padang Panjang ( Tepatnya di Kecamatan Padang Panjang Barat pada Kelurahan Silaing Bawah ). Sesuai dengan penelitian yang dilakukan Kantor - Inspektorat Wilayah Kotamadya Padang Panjang tidak mempunyai Gedung yang berdiri sendiri akan tetapi berada - lingkungan Kantor Walikotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang.

Menurut semestinya kantornya harus berdiri sendiri dan terpisah dengan Dinas-dinas akan diperiksanya. Namun sampai saat penulisan laporan ini masih belum ada - tanda-tanda akan dibangunnya Gedung Inspektorat Wilayah Kotamadya di Padang Panjang.

#### B. IDENTITAS RESPONDEN.

Identitas Responden adalah sangat penting sekali - guna untuk menentukan apakah data yang diperoleh dalam - penelitian ini adalah data yang dapat dipertanggung -

## B A B V.

### P E N U T U P

Bab ini adalah merupakan bab terakhir dari penulisan laporan ini, maka pada bahagian ini akan dikemukakan suatu penelitian terhadap usaha atau pekerjaan penelitian yang peneliti lakukan sehingga peneliti dapat mengambil suatu penafsiran terhadap materi penelitian kelompok ini.

Sesuai dengan latar belakang pemikiran untuk melakukan penelitian kelompok ini dimana sekarang ini pemerintah kita sedang giat-giatnya menganjurkan peningkatan pengawasan dengan bermacam-macam cara apakah itu dengan melalui pendidikan, penataran-penataran atau seminar-seminar, yang kesemuanya itu kalau dilihat adalah bertujuan untuk meningkatkan cara pengawasan mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah.

Dan juga kita ketahui bahwa pengawasan adalah merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan pemerintahan yakni sebagai alat pemegar atau pengontrol jalannya pemerintahan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan dilengkapi dengan data yang diperoleh dari responden ditambah dengan hasil wawancara dengan berbagai pihak yang dirasa berkompeten dengan masalah pengawasan ini, maka peneliti dalam hal ini dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat-Wilayah Kotamadya adalah berupa pengawasan umum -

- ( Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1975
- Kedudukan, tugas, fungsi dan struktur organisasi-  
Inspektorat Wilayah Kotamadya diatur dengan Su -  
rat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 220 ta -  
hun 1979.
  - Inspektorat Wilayah Kotamadya dalam melaksanakan  
tugasnya secara teknis operational bertanggung -  
jawab pada Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II  
dan secara teknis administratifnya bertanggung -  
jawab pada Inspektorat Wilayah Propinsi.
  - Bahwa tidak semua instansi/dinas yang ada di -  
daerah Tingkat II dapat dilakukan pemeriksaan -  
oleh Inspektorat Wilayah Kotamadya khususnya -  
Inspektorat Wilayah Kotamadya Padang Panjang.
  - Masih terdapatnya masalah-masalah yang harus di-  
hadapi oleh Inspektorat Wilayah Kotamadya Padang  
Panjang dalam melakukan pemeriksaan .
  - Masalah-masalah yang dihadapi tersebut adalah -  
antara lain kurangnya dana yang tersedia, kurang  
nya tenaga/tenaga ahli, belum adanya kantor/ge -  
dung milik sendiri dan ditambah dengan kurangnya  
pengertian dari instansi/dinas tentang tugas dan  
fungsi dari aparat pemeriksa.

Setelah peneliti dapat mengambil kesimpulan dari hasil pene-  
litian ini maka selanjutnya peneliti akan mengemukakan bebe-  
rapa saran agar pengawasan yang dilakukan oleh Inspekturat -

Wilayah Kotamadya Padang Panjang dapat berjakan sebagaimana mestinya yakni antara lain :

- Dalam usaha meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan di Daerah Tingkat II Padang Panjang disarankan agar Pemerintah dalam hal ini dapat menambahkan lagi penyediaan dana untuk Inspektorat Wilayah Kotamadya khususnya di Padang Panjang.
- Juga sangat dianjurkan sekali baik pada Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Padang Panjang ataupun Kepala Inspektorat Wilayah ~~Kepulauan~~ untuk menambah tenaga apalagi tenaga ahli agar semua jabatan yang ada di Inspektorat Wilayah Kotamadya tersebut dapat terisi dan sekaligus akan memperlancar pelaksanaan tugas pemeriksaan.
- Untuk masa yang akan datang demi menjaga kedudukan/wibawa Inspektorat Wilayah Kotamadya agar dibangun Kantor/gedung tersendiri sehingga aparatnya benar-benar dapat menjalankan tugasnya secara maksimal sebagaimana yang ditentukan.
- Dianjurkan pada semua instansi/dinas yang terkait dengan tugas pemeriksaan supaya memahami tugas dan fungsi Inspektorat tersebut sehingga tidak ada lagi anggapan bahwa pemeriksaan tersebut hanya untuk mencari-cari kesalahan saja.

Jadi itulah beberapa kesimpulan dan saran yang dapat peneliti kemukakan dalam laporan penelitian kelompok ini, semoga bermanfaat bagi kita semua.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Departemen Dalam Negeri, Buku pedoman pengawasan Umum - di lingkungan Departemen Dalam Negeri, Jakarta, 1981.
2. Departemen Dalam Negeri, Organisasi dan Tata kerja Inspektorat Jendral Departemen Dalam Negeri Jakarta, 1981.
3. Departemen Dalam Negeri. Buku pedoman pemeriksaan khusus sehubungan derakhirnya masa jabatan Kepala - Daerah, Jakarta, 1982.
4. Departemen Dalam Negeri, Inspektorat Wilayah Peropinsi- /Kabupaten/Kotamadya, Jakarta, 1982.
5. Sujanto, Drs, Dasar-dasar manajemen, Pn Miswar, Jkt, 1968.
6. Sarwoto, Drs, Dasar-dasar organisasi dan manajemen , - chalia Indonesia, Jkt, 1987.
7. SP. Siagian, Dr, M.P.A, Filsafat Administrasi, Gunung Agung Jkt, 1970.
8. Sujanto, Ir, Beberapa pengertian di bidang pengawasan - chalia Indonesia, 1983.